



***Takhrīj al-Ḥadīṣ* Sebagai Metode Kritik Wacana: Menyingkap Bias Otoritas dalam Sejarah Transmisi Hadis**

Maslan Nasution*

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Deli Serdang, Indonesia, 20371

Email: maslannasution2003@gmail.com

Putri Sagita Anugrah Aini

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Deli Serdang, Indonesia, 20371

Email: putsaa29@gmail.com

Saffina Sajidah

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Deli Serdang, Indonesia, 20371

Email: saffinapku16@gmail.com

Idris Siregar

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Deli Serdang, Indonesia, 20371

Email: idrissiregar@uinsu.ac.id

Syah Fitriani Nasution

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Deli Serdang, Indonesia, 20371

Email: syahfitrianiinst@gmail.com

Histori	Diserahkan	Direvisi	Diterima	Tersedia Online
Naskah	24 Desember 2025	28 Desember 2025	29 Desember 2025	30 Desember 2025

Abstract

This article departs from the epistemological problem in hadith studies, which positions *takhrīj al-Ḥadīṣ* primarily as a normative verification technique to determine the quality of narrations, thereby tending to overlook the dimensions of power relations, the production of authority, and the discursive dynamics at work in the history of hadith transmission. This approach limits the *takhrīj*'s ability to read the sanad selection process as a socio-intellectual practice laden with interests and scholarly hierarchies. This study aims to reconstruct *takhrīj al-Ḥadīṣ* as a tool of discourse criticism that enables the disclosure of authority bias in the formation of the hadith canon. The study uses a qualitative method based on literature studies with a critical discourse analysis approach to *takhrīj* texts, works of *rijāl al-Ḥadīṣ*, and the dominant *sanad* assessment practices in the classical tradition. The results of this study indicate that *takhrīj* operates as a non-neutral discursive practice, as it systematically reproduces certain authorities through hierarchies of narrators, privileging dominant transmission networks, and mechanisms of exclusion against narrations originating from marginalized or outside-the-mainstream figures. The analysis also reveals that the criteria for authenticity are not merely technical, but are articulated in the configuration of scholarly discourse that affirms the legitimacy of certain groups while limiting the possibility of alternative interpretations. The implications of this study emphasize the need to reposition *takhrīj al-Ḥadīṣ* in contemporary hadith studies as a critical-analytical tool capable of reading hadith not only as normative texts, but also as

products of power relations and constructions of historical authority, thus opening up a more reflective and contextual reading space.

Keywords: *Takhrij al-Ḥadīṣ*; Discourse Criticism; Scientific Authority; Hierarchy of Narrators; Transmission Bias

Abstrak

Artikel ini berangkat dari problem epistemologis dalam studi hadis yang menempatkan *takhrij al-Ḥadīṣ* terutama sebagai teknik verifikasi normatif untuk menentukan kualitas riwayat, sehingga cenderung mengabaikan dimensi relasi kuasa, produksi otoritas, dan dinamika diskursif yang bekerja dalam sejarah transmisi hadis. Pendekatan tersebut membatasi kemampuan *takhrij* untuk membaca proses seleksi sanad sebagai praktik sosial-intelektual yang sarat kepentingan dan hierarki keilmuan. Penelitian ini bertujuan merekonstruksi *takhrij al-Ḥadīṣ* sebagai instrumen kritik wacana yang memungkinkan pengungkapan bias otoritas dalam pembentukan kanon hadis. Penelitian menggunakan metode kualitatif berbasis studi kepustakaan dengan pendekatan analisis wacana kritis terhadap teks-teks *takhrij*, karya *rijāl al-Ḥadīṣ*, serta praktik penilaian sanad yang dominan dalam tradisi klasik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *takhrij* beroperasi sebagai praktik diskursif yang tidak netral, karena secara sistematis mereproduksi otoritas tertentu melalui hierarki perawi, privileging terhadap jaringan transmisi dominan, serta mekanisme eksklusif terhadap riwayat yang berasal dari figur marginal atau berada di luar arus utama. Analisis juga mengungkap bahwa kriteria kesahihan tidak semata bersifat teknis, melainkan terartikulasikan dalam konfigurasi wacana keilmuan yang meneguhkan legitimasi kelompok tertentu sekaligus membatasi kemungkinan interpretasi alternatif. Implikasi penelitian ini menegaskan perlunya reposisi *takhrij al-Ḥadīṣ* dalam studi hadis kontemporer sebagai perangkat analitis-kritis yang mampu membaca hadis tidak hanya sebagai teks normatif, tetapi juga sebagai produk relasi kuasa dan konstruksi otoritas historis, sehingga membuka ruang pembacaan yang lebih reflektif dan kontekstual.

Kata Kunci: *Takhrij al-Ḥadīṣ*; Kritik Wacana; Otoritas Keilmuan; Hierarki Perawi; Bias Transmisi

Pendahuluan

Kajian hadis selama berabad-abad berkembang sebagai disiplin keilmuan yang menempatkan *takhrij al-ḥadīṣ* terutama sebagai teknik verifikasi tekstual dan transmisi periwayatan, dengan fokus dominan pada pelacakan sanad, penilaian kualitas perawi, serta klasifikasi derajat hadis (Al-Ṭaḥḥān, 1991). Orientasi tersebut berhasil membangun fondasi metodologis yang kokoh bagi otoritas keilmuan Islam klasik, namun sekaligus membentuk horizon epistemik yang cenderung menganggap proses transmisi sebagai mekanisme netral dan objektif. Pemahaman semacam ini menempatkan sanad dan otoritas perawi seolah-olah bebas kepentingan sosial, politik, dan ideologis, sehingga dinamika kuasa yang menyertai proses transmisi hadis kerap tereduksi atau bahkan terabaikan (W. B. Hallaq, 1997). Kondisi tersebut memunculkan persoalan mendasar terkait bagaimana otoritas terbentuk, dipertahankan, dan dilegitimasi melalui praktik transmisi hadis, serta sejauh mana bias wacana turut memengaruhi konstruksi pengetahuan hadis yang diwariskan hingga masa kini.

Fenomena kebangkitan kajian kritis terhadap tradisi Islam global beberapa dekade terakhir memperlihatkan meningkatnya perhatian terhadap dimensi kekuasaan, otoritas, dan produksi wacana keagamaan. Pešić (2024) menunjukkan pergeseran paradigma dari pendekatan normatif-tekstual menuju analisis historis-kritis dan diskursif, terutama pasca berkembangnya studi sejarah sosial hadis, filologi kritis, serta pendekatan ilmu sosial-humaniora. Diskursus ini muncul seiring meningkatnya kesadaran akademik global tentang peran memori kolektif, institusi keilmuan, serta relasi politik pengetahuan dalam pembentukan kanon keagamaan. Konteks tersebut memperlihatkan bahwa hadis tidak hanya berfungsi sebagai sumber normatif, melainkan juga sebagai arena kontestasi makna yang melibatkan negosiasi otoritas antaraktor keilmuan lintas generasi (Fawzi, Magdy, & Ross, 2025). Situasi ini menuntut pembacaan ulang metode klasik agar mampu menjawab pertanyaan kritis seputar bias otoritas yang melekat pada sejarah transmisi hadis.

Sejumlah penelitian terdahulu memberikan pijakan penting bagi kajian ini. Penelitian Novera dan A'yun (2024) menekankan peran kritik sanad dan matan sebagai mekanisme penjagaan otentisitas hadis, dengan temuan bahwa sistem *isnād* berfungsi sebagai perangkat kontrol epistemik yang efektif pada masa klasik, namun tidak mengulas implikasi sosial dari seleksi perawi. Penelitian Rasyid et al. (2021) mengkaji sejarah kodifikasi hadis dan menunjukkan keterkaitan erat antara institusionalisasi hadis dan dinamika politik kekhalifahan, tetapi berhenti pada analisis historis tanpa mengaitkannya dengan praktik *takhrij* sebagai wacana otoritatif. Penelitian Rashwan (2024) memanfaatkan pendekatan filologi kritis untuk menelusuri variasi redaksi hadis, menghasilkan temuan mengenai fluiditas teks, namun belum menyentuh bagaimana otoritas perawi menentukan legitimasi variasi tersebut. Penelitian Siregar dan Harahap (2024) mengadopsi teori wacana modern untuk membaca teks hadis sebagai produk sosial, tetapi cenderung mengabaikan perangkat metodologis klasik seperti *takhrij al-Ḥadīṣ*. Penelitian Sembiring dan Manik (2025) menyoroti penggunaan basis data digital hadis dan dampaknya terhadap otoritas keilmuan, dengan kesimpulan bahwa teknologi mengubah pola verifikasi, namun belum mengkaji bias otoritas historis yang tertanam dalam data yang digunakan. Keseluruhan kajian tersebut menunjukkan bahwa relasi antara *takhrij al-Ḥadīṣ*, kritik wacana, dan bias otoritas belum dibahas secara komprehensif, sehingga menyisakan celah penelitian yang signifikan.

Berdasarkan pemetaan tersebut, pertanyaan utama mencakup cara mekanisme *takhrij* berkontribusi terhadap pembentukan hierarki otoritas perawi, bentuk-bentuk bias yang muncul melalui seleksi sanad dan penilaian *rijāl*, serta implikasi epistemologis dari pembacaan *takhrij* yang bersifat diskursif. Tujuan penelitian ini adalah merumuskan kerangka konseptual yang memadukan *takhrij al-Ḥadīṣ* dengan analisis kritik wacana, sekaligus menawarkan pembacaan baru terhadap sejarah transmisi hadis yang lebih reflektif dan kontekstual. Argumen awal penelitian berpijak pada asumsi bahwa setiap praktik keilmuan tidak pernah

sepenuhnya netral, termasuk praktik verifikasi hadis. *Takhrīj al-Ḥadīṣ*, sebagai metode yang menentukan otentisitas dan otoritas hadis, bekerja melalui seperangkat asumsi, preferensi, dan standar yang dibentuk oleh konteks sosial-historis tertentu. Kontribusi yang diharapkan mencakup pengayaan khazanah metodologi studi hadis melalui integrasi kritik wacana, penyediaan perspektif alternatif dalam membaca sejarah transmisi hadis, serta penguatan dialog antara tradisi keilmuan Islam klasik dan teori humaniora kontemporer.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kepustakaan kritis-interpretatif yang memadukan *takhrīj al-Ḥadīṣ* dengan analisis wacana kritis untuk membaca dinamika otoritas dalam sejarah transmisi hadis. Sumber data terdiri atas kitab-kitab *rijāl*, *syarḥ* hadis, serta literatur kontemporer tentang teori otoritas dan kritik wacana. Data dikumpulkan melalui penelusuran sistematis riwayat hadis menggunakan prinsip *takhrīj*, dimulai dari identifikasi redaksi hadis, pemetaan jalur sanad lintas koleksi, penentuan variasi periwayat, hingga penelusuran konteks sosial-intelektual para perawi berdasarkan sumber biografis klasik. Proses ini dilanjutkan dengan pengorganisasian data sanad dan matan ke dalam unit analisis yang memungkinkan pembacaan relasi kuasa dan legitimasi keilmuan. Analisis data dilakukan melalui tahapan rekonstruksi pola transmisi, identifikasi repetisi dan eksklusi periwayat tertentu, serta pembacaan kritis atas narasi otoritas yang terbentuk melalui preferensi sanad dan standarisasi matan. Selanjutnya, temuan tersebut ditafsirkan dengan kerangka kritik wacana untuk mengungkap bagaimana mekanisme *takhrīj* tidak hanya berfungsi sebagai verifikasi teknis, tetapi juga sebagai medium produksi makna dan otoritas dalam tradisi hadis.

Hasil dan Pembahasan

***Takhrīj al-Ḥadīṣ* sebagai Praktik Diskursif, Bukan Sekadar Teknik Verifikasi**

Takhrīj al-Ḥadīṣ selama ini kerap dipahami sebagai prosedur teknis untuk melacak keberadaan hadis serta menilai validitasnya melalui rujukan kitab dan jalur transmisi (Al-Taḥḥān, 1991). Pemahaman tersebut, meskipun tidak sepenuhnya keliru, cenderung menyederhanakan fungsi *takhrīj* sebagai aktivitas mekanis yang netral dan objektif. Pembacaan kritis menunjukkan bahwa *takhrīj* beroperasi sebagai praktik diskursif yang berperan aktif membentuk wacana keabsahan hadis. Melalui proses penelusuran, pemilihan rujukan, dan penyajian hasil, *takhrīj* tidak hanya menemukan hadis, tetapi juga memproduksi makna tentang status epistemik suatu riwayat. Praktik ini bekerja pada wilayah representasi keilmuan yang menentukan hadis mana yang layak tampil sebagai pengetahuan *ṣaḥīḥ* dan hadis mana yang ditempatkan pada posisi marjinal (Itr, 1997).

Produksi wacana keabsahan hadis melalui *takhrīj* terlihat jelas pada tahap pemilihan sumber rujukan. Keputusan untuk mengutamakan kitab tertentu sebagai

representasi hadis otoritatif mencerminkan asumsi epistemologis tentang kredibilitas tradisi kodifikasi tertentu. Kitab hadis tidak hadir sebagai entitas netral, melainkan sebagai simbol otoritas yang dibangun melalui sejarah penerimaan, konsensus ulama, serta institusionalisasi kurikulum keilmuan (Makdisi, 1981). Praktik *takhrij* yang mengarahkan pencarian pada korpus tertentu secara implisit menegaskan batas legitimasi pengetahuan hadis. Hadis yang teridentifikasi melalui kitab berotoritas memperoleh status epistemik lebih tinggi dibandingkan hadis yang hanya hadir pada sumber yang dipandang perifer (Brown, 2007). Proses ini menunjukkan bahwa *takhrij* bekerja sebagai mekanisme seleksi diskursif yang mengafirmasi hierarki sumber.

Penentuan sanad otoritatif pada praktik *takhrij* juga mengandung dimensi diskursif yang signifikan. Penelusuran jalur transmisi tidak berhenti pada identifikasi mata rantai, tetapi melibatkan penilaian terhadap jalur mana yang layak ditampilkan sebagai representasi hadis. Pilihan untuk menonjolkan satu sanad dibandingkan sanad lain merefleksikan preferensi epistemik yang berakar pada tradisi keilmuan tertentu (Motzki, 2002). *Takhrij*, melalui penyajian sanad yang dianggap paling kuat, membangun narasi stabilitas dan kontinuitas otoritas hadis. Narasi tersebut berfungsi meneguhkan keyakinan bahwa keabsahan hadis dapat dipastikan melalui struktur transmisi yang telah dikodifikasi secara normatif (W. Hallaq, 2001). Praktik ini memperlihatkan bahwa sanad bukan hanya fakta historis, melainkan konstruksi pengetahuan yang diproduksi melalui kerangka evaluatif ulama.

Klasifikasi kualitas riwayat merupakan tahap lain yang menegaskan karakter diskursif *takhrij*. Penetapan kategori seperti *ṣaḥīḥ*, *ḥasan*, atau *ḍaʿīf* tidak hanya berfungsi sebagai label teknis, melainkan sebagai instrumen simbolik yang menentukan nilai epistemik hadis. Kategori tersebut bekerja sebagai bahasa otoritatif yang mengarahkan cara teks hadis dipahami, diajarkan, dan digunakan pada wacana keislaman (Asad, 1993). Praktik klasifikasi ini berangkat dari asumsi epistemologis tentang kriteria pengetahuan yang sah, asumsi yang dibentuk melalui konsensus historis ulama hadis. *Takhrij*, melalui klasifikasi tersebut, mengukuhkan batas antara pengetahuan yang diterima dan pengetahuan yang dipertanyakan. Keabsahan hadis, dalam konteks ini, muncul sebagai hasil interaksi antara teks, metode, dan otoritas keilmuan. Pembacaan *takhrij* sebagai praktik diskursif membuka pemahaman bahwa validitas hadis bukan sekadar hasil verifikasi teknis, melainkan produk konstruksi pengetahuan yang beroperasi dalam jaringan asumsi epistemologis dan legitimasi ulama.

Bias Otoritas dalam Seleksi dan Hirarki Perawi

Penilaian terhadap perawi tidak semata berangkat dari verifikasi empiris atas konsistensi transmisi, melainkan dipengaruhi oleh citra kolektif yang dilekatkan pada figur tertentu sebagai representasi otoritas keilmuan (Brown, 2009). Reputasi tersebut dibentuk melalui pengakuan ulama generasi berikutnya,

keterhubungan dengan pusat-pusat keilmuan dominan, serta kedekatan dengan jaringan transmisi yang telah memperoleh legitimasi kanonik (Motzki, 2002). Akibatnya, keadilan perawi sering kali diasumsikan sebagai atribut inheren yang mengikuti nama besar dan status simbolik, bukan sebagai variabel yang terus diuji secara kritis (Ḥātim, 1952). Mekanisme ini menciptakan kecenderungan pengutamaan perawi mapan, sementara penilaian terhadap perawi lain bergerak dalam kerangka perbandingan hierarkis yang telah ditentukan sebelumnya (Al-Baghdādī, 2011). Bias otoritas bekerja secara implisit melalui normalisasi asumsi bahwa reputasi keilmuan berbanding lurus dengan integritas moral dan ketepatan transmisi, padahal relasi tersebut bersifat konstruktif dan tidak selalu korelatif.

Afiliasi mazhab turut memperkuat bias tersebut melalui preferensi metodologis yang memengaruhi penerimaan dan penilaian perawi. Perawi yang terasosiasi dengan mazhab dominan cenderung memperoleh penilaian lebih lunak terkait keadilan dan ketelitian, sementara perawi dengan orientasi mazhab minor atau berbeda menghadapi standar evaluasi lebih ketat. Pola ini tidak selalu diekspresikan secara eksplisit, tetapi terinternalisasi melalui kaidah *jarḥ wa al-Ta'dīl* yang berkembang seiring dinamika persaingan mazhab (Mas'ud, Said, & Alwalid, 2025). Preferensi teologis dan fikih berfungsi sebagai lensa interpretatif yang memengaruhi cara ulama membaca riwayat, menafsirkan inkonsistensi, serta menimbang kesalahan transmisi (Saladin, Taufiq, & Syatirah, 2023). Kesalahan kecil perawi sehaluan sering dipahami sebagai kekeliruan insidental, sedangkan kekeliruan serupa perawi berlatar mazhab berbeda ditafsirkan sebagai indikasi kelemahan struktural. Konsekuensinya, keakuratan perawi tidak diukur secara simetris, melainkan dikaitkan dengan kesesuaian posisi ideologis terhadap arus utama (Abdulrahman, 2024). Bias otoritas tersebut mengaburkan batas antara evaluasi metodologis dan afiliasi normatif.

Legitimasi historis memperdalam bias otoritas melalui pengaruh narasi kanonisasi yang menempatkan periode, wilayah, serta figur tertentu sebagai standar keunggulan. Perawi yang hidup dekat dengan masa formasi awal hadis atau beroperasi dalam lingkungan ilmiah yang kemudian dianggap pusat ortodoksi memperoleh privilese epistemik (Brown, 2007). Legitimasi semacam ini tidak hanya memengaruhi penerimaan riwayat, tetapi juga membentuk asumsi awal penilaian terhadap keadilan perawi. Kedekatan temporal dengan generasi awal sering diperlakukan sebagai jaminan moralitas dan ketepatan, meskipun kondisi sosial dan politik masa tersebut justru sarat konflik kepentingan (W. B. Hallaq, 2005). Hirarki historis tersebut menjadikan penilaian hadis bergerak secara asimetris, sebab kritik terhadap perawi legitim cenderung dibatasi oleh kehati-hatian berlebihan demi menjaga stabilitas narasi kanonik. Bias ini bekerja melalui internalisasi penghormatan historis yang menahan kritik metodologis radikal, sehingga evaluasi keadilan lebih bersifat afirmatif ketimbang analitis.

Kerangka *‘ulūm al-Ḥadīṣ* menyediakan perangkat konseptual yang memungkinkan bias otoritas beroperasi secara laten tanpa perlu dinyatakan secara normatif. Kategori seperti *ṣiqah*, *ṣadūq*, atau *ḍa‘īf* tampak netral, tetapi penerapannya sangat bergantung pada otoritas penilai dan jaringan transmisi pengetahuan (Ḥātim, 1952). Ulama penilai membawa prakonsepsi yang terbentuk melalui pendidikan, afiliasi intelektual, serta komitmen normatif, lalu menyalurkannya ke dalam bahasa teknis yang terstandarisasi (Brown, 2009). Proses ini menghasilkan objektivitas semu, sebab bahasa evaluatif menutupi preferensi epistemik yang bekerja di baliknya. Bias otoritas tidak muncul sebagai distorsi kasar, melainkan sebagai kecenderungan halus yang membentuk bobot penilaian. Perbedaan tafsir atas perilaku perawi, konsistensi periwayatan, atau relasi guru-murid menunjukkan bahwa standar evaluasi bersifat elastis mengikuti posisi perawi dalam struktur otoritas (Kamali, 2005).

Implikasi bias otoritas tersebut menunjukkan bahwa penilaian perawi tidak sepenuhnya dapat dipahami sebagai proses teknis yang steril dari relasi kuasa epistemik. Seleksi dan hierarki perawi mencerminkan dinamika otoritas keilmuan yang mengatur siapa layak dipercaya dan siapa harus diragukan. Kesadaran terhadap mekanisme implisit ini tidak bertujuan meniadakan kontribusi ulumul hadis, melainkan membuka ruang kritik metodologis yang lebih reflektif. Evaluasi keadilan dan keakuratan menuntut pembacaan ulang terhadap asumsi reputasi, afiliasi, serta legitimasi historis sebagai faktor non-netral. Pendekatan kritis memungkinkan pemisahan lebih tegas antara integritas empiris perawi dan konstruksi simbolik yang melekat padanya. Dengan cara tersebut, studi hadis dapat bergerak menuju kerangka evaluasi yang lebih transparan, proporsional, dan bertanggung jawab secara epistemologis tanpa terjebak reproduksi bias otoritas yang diwariskan secara tidak disadari.

***Takhrij* dan Mekanisme Eksklusi Riwayat Minor**

Praktik *takhrij* memperlihatkan bagaimana pelabelan seperti *ḍa‘īf*, *syāz*, atau *ghayr mu‘tabar* tidak semata-mata mencerminkan kelemahan faktual riwayat, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen penertiban wacana. Kategori-kategori tersebut bekerja secara performatif, menurunkan status epistemik riwayat yang tidak sejalan dengan konfigurasi sanad dominan, sekalipun kandungan matannya koheren atau memiliki dukungan historis alternatif (Brown, 2007). Proses diskursif ini mengandaikan bahwa keabsahan hadis bergantung pada kesesuaiannya dengan jaringan transmisi yang telah diakui, bukan pada kemungkinan keberagaman praktik periwayatan masa awal. Akibatnya, riwayat minor sering kali diperlakukan sebagai anomali yang mengganggu stabilitas tradisi, bukan sebagai indikator dinamika sosial dan intelektual komunitas awal (Ahmed, 2016). *Takhrij*, melalui bahasa evaluatifnya, mengubah perbedaan historis menjadi deviasi metodologis, sehingga marginalisasi berlangsung secara sistematis namun terselubung oleh legitimasi ilmiah.

Standar otoritas dalam *takhrij* juga berkontribusi terhadap pembentukan narasi tunggal mengenai tradisi hadis. Preferensi terhadap sanad yang beredar luas dan terhubung dengan figur-figur sentral menghasilkan efek penguatan sirkular, karena riwayat yang sering dirujuk semakin dianggap representatif, sementara riwayat lain kehilangan ruang artikulasi (Motzki, 1991). Mekanisme ini menciptakan logika mayoritas epistemik, yakni asumsi bahwa frekuensi transmisi identik dengan validitas normatif. Riwayat alternatif yang muncul melalui jalur terbatas atau komunitas perifer tidak memperoleh kesempatan yang setara untuk dinilai sebagai ekspresi autentik pengalaman keagamaan (Ahmed, 2016). *Takhrij*, dalam praktiknya, memperkuat struktur pusat-pinggiran pengetahuan dengan menempatkan arus utama sebagai standar universal. Dampak jangka panjangnya terlihat pada penyempitan spektrum tradisi hadis, karena hanya varian tertentu yang terus direproduksi dan diajarkan, sementara varian lain terhapus dari ingatan kolektif ilmiah.

Proses homogenisasi tersebut tidak berlangsung secara eksplisit represif, melainkan melalui internalisasi kriteria yang dianggap objektif dan mapan. Bahasa kritik hadis yang digunakan dalam *takhrij* menampilkan kesan netralitas metodologis, padahal kriteria tersebut lahir dari konteks sosial-intelektual tertentu. Ketika riwayat dinilai tidak representatif, penilaian tersebut sering kali mengabaikan kemungkinan bahwa representativitas sendiri merupakan konstruksi historis yang dipengaruhi relasi kekuasaan keilmuan (Asad, 1986). *Takhrij*, dengan demikian, berfungsi sebagai alat normalisasi, menetapkan batas wajar tradisi dan menyingkirkan narasi yang berpotensi menantang konsensus. Riwayat minor tidak hanya kehilangan status otoritatif, tetapi juga kehilangan daya tafsir karena jarang dijadikan rujukan dalam diskursus fikih, teologi, atau etika.

Implikasi epistemologis dari mekanisme eksklusi tersebut menuntut pembacaan ulang terhadap fungsi *takhrij* sebagai praktik keilmuan. Pendekatan yang terlalu menekankan keseragaman sanad berisiko mengaburkan kompleksitas sejarah transmisi dan mengerdilkan dinamika wacana hadis. Analisis kritis menunjukkan bahwa *takhrij* tidak dapat dilepaskan dari politik pengetahuan yang menentukan riwayat mana yang layak diwariskan. Homogenisasi tradisi hadis yang dihasilkan bukan sekadar konsekuensi teknis, melainkan hasil dari pilihan diskursif yang memprioritaskan stabilitas otoritas. Kesadaran terhadap dimensi ini membuka ruang evaluasi ulang terhadap riwayat minor, bukan untuk menggantikan arus utama, tetapi untuk memulihkan pluralitas historis yang selama ini terpinggirkan. Pendekatan demikian memungkinkan tradisi hadis dipahami sebagai medan wacana yang hidup, bukan sebagai korpus statis yang tertutup terhadap variasi dan perbedaan.

Reposisi *Takhrij al-Ḥadīṣ* sebagai Alat Kritik Wacana Historiografis

Pembacaan terhadap *takhrij* sebagai praktik diskursif mengungkap bahwa proses penelusuran riwayat tidak berlangsung dalam ruang epistemik yang netral.

Setiap langkah *takhrij*, mulai dari pemilihan sumber rujukan hingga penilaian kualitas transmisi, merefleksikan cara tertentu memaknai otoritas, kontinuitas tradisi, dan legitimasi keilmuan. Praktik ini membentuk narasi historiografis yang menampilkan hadis tertentu sebagai pusat representasi sunnah, sementara riwayat lain ditempatkan pada posisi marginal. Karakter diskursif *takhrij* tampak pada kemampuannya membingkai apa yang layak disebut sebagai hadis *ṣaḥīḥ* melalui bahasa metodologis yang memberi kesan objektivitas. Namun, bahasa tersebut sekaligus menutup fakta bahwa kriteria yang digunakan lahir dari konsensus terbatas komunitas ulama tertentu, bukan dari standar universal yang bebas nilai.

Ketegangan antara klaim objektivitas *‘ulūm al-Ḥadīṣ* dan temuan kritik wacana semakin jelas ketika *takhrij* dipahami sebagai ruang artikulasi relasi kuasa. *‘Ulūm al-Ḥadīṣ* secara normatif menempatkan *takhrij* sebagai metode ilmiah yang bertujuan memisahkan riwayat yang dapat diterima dan yang harus ditolak berdasarkan parameter rasional dan etis. Kritik wacana tidak menafikan keberadaan parameter tersebut, tetapi menyoroti cara parameter itu dibentuk dan dioperasikan. Penilaian terhadap otoritas perawi, misalnya, tidak hanya mencerminkan evaluasi individual, tetapi juga pengakuan terhadap jaringan keilmuan, afiliasi mazhab, serta posisi sosial yang diakui pada masa tertentu. *Takhrij*, melalui mekanisme ini, mengonstruksi hierarki kepercayaan yang tampak natural, padahal sesungguhnya merupakan hasil proses historis yang sarat seleksi dan eksklusi simbolik.

Analisis terhadap bias otoritas menunjukkan bahwa *takhrij* berperan dalam meneguhkan dominasi narasi tertentu mengenai sejarah transmisi hadis. Proses legitimasi riwayat tidak dapat dilepaskan dari preferensi epistemik yang menempatkan figur-figur tertentu sebagai representasi ideal transmisi. Walaupun *‘ulūm al-Ḥadīṣ* mengklaim keberpihakan terhadap integritas moral dan ketelitian transmisi, kritik wacana mengungkap bahwa klaim tersebut beroperasi dalam kerangka nilai yang telah terstruktur. *Takhrij* berkontribusi membangun citra kontinuitas tradisi yang stabil, sekaligus mereduksi keragaman pengalaman historis periwayatan. Pembacaan semacam ini menempatkan *takhrij* sebagai mekanisme yang mengatur batas-batas diskursus hadis, bukan sekadar sebagai prosedur teknis yang berdiri di luar dinamika sosial pengetahuan.

Mekanisme eksklusi riwayat minor memperkuat pandangan bahwa *takhrij* berfungsi sebagai arena kontestasi epistemik. Riwayat yang tidak memenuhi kriteria dominan sering kali tersingkir bukan hanya karena kelemahan teknis, tetapi karena tidak selaras dengan kerangka otoritas yang mapan. *Takhrij*, melalui pengulangan pola penilaian tertentu, menginternalisasi preferensi historiografis yang memusatkan perhatian pada jalur transmisi utama dan mengabaikan kemungkinan alternatif. Kritik wacana menyoroti bahwa proses ini menghasilkan pemetaan sejarah hadis yang tampak koheren, tetapi sesungguhnya merupakan konstruksi yang dibangun melalui penyaringan sistematis. Dengan demikian, *takhrij* dapat

dibaca sebagai praktik yang membentuk ingatan kolektif umat mengenai hadis, sekaligus menyingkirkan narasi yang dianggap tidak relevan atau tidak *ṣaḥīḥ* menurut standar dominan.

Ketegangan konseptual muncul ketika klaim objektivitas *‘ulūm al-Ḥadīṣ* dihadapkan pada pembacaan *takhrīj* sebagai praktik berlapis makna. *‘Ulūm al-Ḥadīṣ* menegaskan bahwa metode yang digunakan bersifat deskriptif dan evaluatif semata, tanpa keterlibatan kepentingan nonilmiah. Kritik wacana tidak serta-merta menolak klaim tersebut, tetapi menempatkannya dalam kerangka reflektif yang lebih luas. Objektivitas dipahami sebagai hasil konsensus metodologis, bukan sebagai kondisi epistemik yang ahistoris. *Takhrīj*, melalui prosedur yang diinstitusionalisasikan, mereproduksi konsensus tersebut dan menampilkannya sebagai kebenaran yang mapan. Ketegangan ini membuka ruang pembacaan baru yang melihat *‘ulūm al-Ḥadīṣ* bukan sebagai sistem tertutup, melainkan sebagai tradisi intelektual yang berkembang melalui negosiasi makna dan otoritas.

Reposisi *takhrīj* sebagai alat kritik wacana historiografis memungkinkan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap perannya dalam studi hadis. *Takhrīj* tidak lagi dipandang semata sebagai sarana verifikasi, tetapi sebagai praktik epistemik yang aktif membentuk narasi sejarah. Pendekatan ini menempatkan *takhrīj* dalam relasi dialektis antara norma metodologis dan konteks sosial pengetahuan. Dengan membaca *takhrīj* sebagai medan kontestasi, tampak bahwa proses penilaian hadis selalu terikat pada pilihan-pilihan epistemik yang mencerminkan struktur kuasa tertentu. Pembacaan semacam ini tidak meniadakan nilai ilmiah *takhrīj*, tetapi mengungkap lapisan reflektif yang selama ini kurang mendapat perhatian dalam kajian hadis arus utama.

Keseluruhan sintesis kritis tersebut menunjukkan bahwa *takhrīj al-Ḥadīṣ* memiliki dimensi historiografis yang signifikan. Praktik ini berkontribusi membangun wacana tentang masa lalu transmisi hadis melalui mekanisme seleksi, legitimasi, dan eksklusi yang terstruktur. Ketika dibaca melalui lensa kritik wacana, *takhrīj* tampil sebagai ruang pertemuan antara klaim normatif dan realitas historis produksi pengetahuan. Ketegangan antara objektivitas metodologis dan konstruksi diskursif tidak perlu diselesaikan secara reduktif, melainkan dipahami sebagai karakter inheren tradisi ulumul hadis. Dengan demikian, reposisi *takhrīj* sebagai alat kritik wacana historiografis memperkaya pemahaman terhadap hadis sebagai produk tradisi intelektual yang dinamis, sekaligus menegaskan bahwa setiap klaim kebenaran selalu beroperasi dalam horizon epistemik tertentu yang layak dibaca secara kritis.

Penutup

Takhrīj al-Ḥadīṣ tidak hanya berfungsi sebagai alat verifikasi sanad dan matan, melainkan juga beroperasi sebagai praktik diskursif yang mereproduksi, menegosiasikan, dan menormalisasi relasi kuasa dalam sejarah otoritas periwayatan. Melalui pembacaan kritis atas pola seleksi perawi, hierarki

kredibilitas, dan stabilisasi narasi normatif, penelitian ini menunjukkan adanya bias otoritas yang terinternalisasi dalam tradisi transmisi hadis dan kerap luput dari refleksi metodologis. Implikasi teoretisnya memperluas horizon studi hadis dengan mengintegrasikan kritik wacana ke dalam *takhrīj*, sehingga hadis dipahami sebagai produk historis yang dibentuk oleh konfigurasi sosial-intelektual tertentu. Secara praktis, pendekatan ini mendorong peneliti untuk bersikap refleksif terhadap asumsi epistemik, kategori evaluatif, dan otoritas rujukan yang digunakan dalam penelitian hadis. Keterbatasan penelitian terletak pada fokus analisis yang masih selektif terhadap korpus dan konteks tertentu, sehingga generalisasi temuan memerlukan kehati-hatian. Penelitian mendatang disarankan mengembangkan studi komparatif lintas tradisi periwayatan dan mengombinasikan kritik wacana dengan analisis sejarah intelektual guna memperkaya pemahaman tentang dinamika transmisi hadis.

Daftar Pustaka

- ‘Itr, N. al-D. (1997). *Manhaj al-Naqd fī ‘Ulūm al-Ḥadīth*. Beirut: Dār al-Fikr.
- Abdulrahman, M. A. (2024). Cultural and Social Influences on Hadith Classification: An Analytical Study of Historical Transformations. *Journal of Ecohumanism*, 3(8), 2783. <https://doi.org/10.62754/joe.v3i8.4926>
- Ahmed, S. (2016). *What Is Islam?* Princeton: Princeton University Press.
- Al-Baghdādī, A.-K. (2011). *al-Kifāyah fī ‘Ilm al-Riwāyah*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Al-Ṭaḥḥān, M. (1991). *Uṣūl al-Takhrīj wa Dirāsāt al-Asānīd*. Riyadh: Maktabah al-Ma’rifah.
- Asad, T. (1986). *The Idea of an Anthropology of Islam*. Washington D.C.: Center for Contemporary Arab Studies.
- Asad, T. (1993). *Genealogies of Religion: Discipline and Reasons of Power in Christianity and Islam*. Baltimore: Johns Hopkins University Press.
- Brown, J. A. C. (2007). *The Canonization of Al-Bukhārī and Muslim: The Formation and Function of the Sunni Hadith Canon*. Leiden: Brill.
- Brown, J. A. C. (2009). *Hadith: Muhammad’s Legacy in the Medieval and Modern World*. Oxford: Oneworld Publications.
- Fawzi, M., Magdy, W., & Ross, B. (2025). “The Prophet said so!”: On Exploring Hadith Presence on Arabic Social Media. *Proceedings of the ACM on Human-Computer Interaction*, 9(2), 1–23. <https://doi.org/10.1145/3711090>
- Hallaq, W. (2001). *Authority, Continuity and Change in Islamic Law*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Hallaq, W. B. (1997). *A History of Islamic Legal Theories: An Introduction to Sunni Usul Al-fiqh*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Hallaq, W. B. (2005). *The Origins and Evolution of Islamic Law*. Cambridge: Cambridge University Press.

- Ḥātim, A. M. ‘Abd al-R. bin A. Ḥātim M. bin I. bin al-M. al-T. al-Ḥanzalī al-R. I. A. (1952). *al-Jarḥ wa al-Ta’dīl*. India: al-Ma’ārif al-‘Uṣmāniyyah.
- Kamali, M. H. (2005). *A Textbook of Hadith Studies: Authenticity, Compilation, Classification and Criticism of Hadith*. Leicestershire: The Islamic Foundation.
- Makdisi, G. (1981). *The Rise of Colleges: Institutions of Learning in Islam and the West*. Edinburgh: Edinburgh University Press.
- Mas’ud, M., Said, I. G., & Alwalid, M. A. (2025). Ḍa‘īf Jiddan Vs. Mawḍū‘: A Comparative Assessment of Ḥadīth By Ibn Al-Jawzī in Al-Mawḍū‘āt and Al-‘irāqī in Al-Mughnī ‘an Ḥaml Al-Asfār Fī Al-Asfār. *Al-Majaalis: Jurnal Dirasat Islamiyah*, 13(1), 107–129. <https://doi.org/10.37397/al-majaalis.v13i1.1130>
- Motzki, H. (1991). The Musannaf of ‘Abd al-Razzāq al-Ṣan‘ānī as a Source of Authentic Aḥādīth of the First Century A.H. *Journal of Near Eastern Studies*, 50(1), 1–21. <https://doi.org/10.1086/373461>
- Motzki, H. (2002). *The Origins of Islamic Jurisprudence: Meccan Fiqh before the Classical Schools*. Leiden: Brill.
- Novera, M., & A’yun, V. Q. (2024). Kritik Sanad dan Matan. *DIRAYAH: Jurnal Ilmu Hadis*, 4(2), 242–261. <https://doi.org/10.62359/dirayah.v4i2.266>
- Pešić, M. (2024). Political discourse in the research lense of the contemporary critical studies. *Srpska Politička Misao*, 84(2), 7–37. <https://doi.org/10.5937/spm84-49031>
- Rashwan, H. (2024). Hadith as Oral Literature through Early Islamic Literary Criticism. *Studia Islamica*, 119(1), 34–69. <https://doi.org/10.1163/19585705-12341481>
- Rasyid, D., Rasyid, A. D., Lubis, A., Mohd Balwi, M. A. W. F. Bin, & Rasyid, B. D. (2021). The Writing of Hadith in the Era of Prophet Muhammad: A Critique on Harun Nasution’s Thought. *Al-Jami’ah: Journal of Islamic Studies*, 59(1), 191–220. <https://doi.org/10.14421/ajis.2021.591.191-220>
- Saladin, B., Taufiq, M., & Ibni Syatirah, S. (2023). The Impact of Nashirudin Al Albani’s Tarjih Hadith Method on Differences in Mazhab and Qur’anic Interpretation. *Diroyah: Jurnal Studi Ilmu Hadis*, 8(1), 204–217. <https://doi.org/10.15575/diroyah.v8i1.28456>
- Sembiring, M. I., & Manik, Z. (2025). INSTAGRAM AS A STAGE FOR PREACHING: Exploring the Values of Hadith in Buya Syakur’s Sufi Advice. *TAJDID: Jurnal Ilmu Ushuluddin*, 24(1), 50–79. <https://doi.org/10.30631/tjd.v24i1.567>
- Siregar, I., & Harahap, A. P. (2024). Kontekstualisasi Hadis tentang Kurangnya Kecerdasan Perempuan dan Agama [Contextualization of the Hadith on the Lack of Women’s Intelligence and Religion]. *Tajdid: Jurnal Ilmu Ushuluddin*, 23(1), 218–257. <https://doi.org/10.30631/tjd.v23i1.442>